

ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEBUMEN

¹ Andjar Prasetyo, SE, M.Si

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang

² Moch. Lukluil Maknun, M.A

Balai Litbang Agama Kementerian Agama Semarang

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi dan analisis data kependudukan berdasarkan struktur dan lima aspek kependudukan (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan), serta kewilayahan di Kabupaten Kebumen. Kemudian menyusun rekomendasi dan rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan menyusun model *Grand Design* Kependudukan. Metode analisis menggunakan dekripsi kuantitatif dan kualitatif dengan lokus pada Kabupaten Kebumen. Kajian dilaksanakan selama 4 bulan (120 hari kalender) mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020, menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen berupa data Kependudukan, Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kebumen berupa Pendataan Keluarga (PK) Keluarga Berencana dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa data Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kebumen. Data Primer yang terfokus dan relevan yang dapat digunakan, dengan mengadakan diskusi bersama Kepala Dinas dan para pejabat struktural di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kebumen, hasil diskusi menjadi salah satu indikator kualitatif untuk analisa. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Model Autoregresif Integrated Moving Average* (ARIMA) dan SWOT. Hasilnya kesiapan Kabupaten Kebumen dari beberapa faktor, meliputi Komitmen pemerintah, kelembagaan yang menangani masalah kependudukan, Ketersediaan SDM yang terstruktur dan berjenjang, ketersediaan sarana Teknologi Informasi dan Partisipasi masyarakat. di samping itu meskipun secara implisit formulasi anggaran memiliki kesamaan dalam penanganan masalah kependudukan karena kewenangan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan rekomendasi dan rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah diawali dengan kerangka GDP Kependudukan, pendekatan literasi kemudian dilakukan identifikasi dan analisis merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kelima aspek kependudukan. Model *Grand Design* Kependudukan didasarkan pada pendekatan administratif dan substantif dengan integrasi lima aspek kependudukan yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah dengan memenuhi mekanisme penyusunan peraturan daerah.

Kata Kunci : Perencanaan Strategis, Grand Design Pembangunan Kependudukan, SWOT, ARIMA

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Kebumen hingga saat ini belum maksimal, terutama jika dilihat dari sisi kuantitas penduduk. Hal ini terlihat dari laju

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen yang masih mencapai 2,87% atau 33.386 jiwa selama periode 2010-2018, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen

mencapai 1.161.706 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen telah mencapai 1.195.092 jiwa bersumber dari BPS Kabupaten Kebumen. Selain itu angka kelahiran

Isu strategis lainnya yang terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk di Kabupaten Kebumen adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan *windows of opportunity*, sehingga jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Kabupaten Kebumen perlu untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan di Kebumen. Disamping itu juga indikator yang umumnya digunakan masih belum secara maksimal sesuai dengan kondisi hasil pembangunan yang diharapkan. Persoalan kependudukan lainnya yang dihadapi Kabupaten Kebumen adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah dan mobilitas penduduk. Jumlah penduduk Kebumen yang terus meningkat cukup pesat setiap tahunnya juga tidak terlepas dari peran migrasi baik migrasi keluar dan terutama migrasi masuk.

Selain masalah kuantitas dan mobilitas, kondisi kependudukan yang dihadapi Kabupaten Kebumen menjadi lebih kompleks karena juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Hal ini terlihat pada pencapaian indikator kualitas penduduk yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun dari tahun ke tahun pencapaian IPM Kebumen mengalami kenaikan meskipun masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, tetapi

total atau *Total Fertility Rate* (TFR) masih berada lebih dari 2,1% yang artinya belum diarahkan atau dikendalikan secara optimal

peningkatan tersebut terlihat lambat. Selama periode 5 tahun dari tahun 2014 - 2018, IPM Kebumen hanya meningkat rata-rata sebesar 1,17 per tahunnya, sehingga membutuhkan strategi akselerasi yang efektif untuk mencapai IPM yang lebih baik.

Untuk mengatasi pengelolaan kependudukan di Kebumen dan berbagai persoalan yang mungkin timbul akibat pertambahan penduduk yang tidak terkendali, diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di Kebumen terutama arah kebijakan dan strategi umum yang tertuang di dalam Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten (GDPK) Kebumen Tahun 2020 - 2055 dengan indikator yang jelas, terarah dan tepat. Rencana ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional.

Sebagai upaya untuk melaksanakan penyusunan *Grand Design* tersebut, setidaknya dapat dibentuk Tim melalui Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kependudukan *Grand Design* Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045. Tim koordinasi terdiri dari lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun grand design termasuk roadmap pembangunan

kependudukan sesuai dengan bidangnya. Kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kelompok Kerja I); 2)Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (Kelompok Kerja II); 3) Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk (Kelompok Kerja III); 4)Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja IV); dan 5)Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan (Kelompok Kerja V).

Dokumen *Grand design* ini akan merupakan integrasi dan penyerasian kelima bidang yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok kerja dan diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten Kebumen serta mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya.

Rancangan Induk ini merupakan arahan kebijakan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Kabupaten Kebumen dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045. Untuk itu maka dalam dokumen ini dicantumkan pula roadmap yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan upaya-upaya yang perlu diambil oleh setiap OPD/sektoral/lembaga dalam mendukung implementasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Kebumen. Diharapkan dengan menggunakan referensi tersebut, rancangan induk yang dihasilkan merupakan dokumen yang komprehensif, akomodatif, dan terstruktur. Kajian Awal Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kepen-

dudukan dengan tujuan sebagai berikut
1) Identifikasi dan analisis data kependudukan berdasarkan struktur dan lima aspek kependudukan (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan), serta kewilayahan di Kabupaten Kebumen; 2) Penyusunan rekomendasi dan rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan; dan 3) Penyusunan model *Grand Design* Kependudukan.

1. Kependudukan

Dalam beberapa literatur kependudukan umum disebut dengan demografi memiliki beberapa definisi. Ada beberapa definisi yang dapat disampaikan pada sub bab ini terkait dengan demografi, dirangkum dalam (Burch, 2017) dijelaskan sebagai berikut Demografi adalah sejarah alam dan sosial dari spesies manusia atau pengetahuan matematika populasi, perubahan umum mereka, dan kondisi fisik, sipil, intelektual, dan moral mereka dalam Guillard (1855) sitasi dalam *Shryock, Siegel and Associates* (1973: 2).

Selanjutnya didefinisikan Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia, terutama yang berkaitan dengan ukuran, struktur, dan perkembangannya dalam *International Union for the Scientific Study of Population* (1958: 3). Kemudian disebutkan pula Demografi adalah studi tentang ukuran, distribusi wilayah, dan komposisi populasi, perubahan di dalamnya, dan komponen-komponen perubahan tersebut, yang dapat diidentifikasi sebagai kelahiran, kematian, pergerakan wilayah (migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status)

dalam Hauser and Duncan (1959: 31) dan beberapa artikel yang mendefinisikan demografi (lihat Bogue (1969: 1–2), Shryock, Siegel and Associates (1973: 2), Wunsch and Termote (1978: 1), Hinde (1998: 1), Preston et al. (2001: Kata Pengantar), Weinstein dan Pillai (2001: 5), Siegel dan Swanson (2004: 1).

a. Kesehatan Masyarakat

Dalam (Guli, Bal and Cori, 2014) disebutkan bahwa ada berbagai pandangan dan pemahaman tentang istilah "kesehatan masyarakat" oleh berbagai negara dan budaya. Ada negara-negara di mana kesehatan masyarakat setara dengan perlindungan kesehatan dan kebutuhan untuk memasuki bidang analisis kebijakan dan analisis dampak kebijakan tidak terlalu dirasakan. Fungsi kesehatan masyarakat yang penting didefinisikan pertama oleh CDC (<http://www.cdc.gov/nphpsp/essential-services.html>) dan kemudian diadopsi oleh WHO (Bettcher et al. 1998) berfungsi sebagai elemen pemersatu di seluruh dunia pada konten publik kesehatan. Baru-baru ini WHO Eropa mengubah terminologi menjadi operasi kesehatan masyarakat yang penting ([http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/](http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/Sistem%20kesehatan%20layanan%20kesehatan%20publik%20kebijakan%20operasi-10-esensial-publichealth-) Sistem kesehatan / layanan kesehatan publik / kebijakan / operasi-10-esensial-publichealth-) dan memperbarui daftar. Sepuluh operasi kesehatan esensial yang esensial seperti yang disajikan dibawah.

b. Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan Kabupaten Kebumen yang diinginkan adalah tercapainya penduduk yang stabil dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan daya dukung daerah. Untuk mencapai kondisi ini maka jumlah bayi lahir dan migrasi masuk diharapkan seimbang

dengan jumlah kematian dan migrasi keluar sehingga jumlah penduduk menjadi stasioner. Pada kondisi yang lain usia harapan hidup seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya semakin meningkat dan adanya migrasi netto yang positif maka penurunan jumlah kelahiran menjadi indikator utama untuk mencapai penduduk yang seimbang. Untuk itu maka Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) yang menjadi indikator pencapaian penduduk seimbang yang perlu ditargetkan dalam RPJMD secara bertahap dan yang ingin dicapai sampai dengan akhir perencanaan adalah dibawah angka 2, dimana dalam RPJMN pada tahun 2035 target TFR adalah 1,85.

(Smallwood, 2017) menjelaskan tentang TFR, menggambarkan dinamika kesuburan dari waktu ke waktu, para ahli demografi membedakan antara ukuran kelompok dan periode. Pengukuran kohort berlaku untuk masa hidup orang yang lahir pada waktu yang sama, sedangkan pengukuran periode adalah *cross-sectional*, dan berlaku lintas usia orang yang hidup pada saat yang bersamaan. Langkah-langkah kohort lebih "nyata" dalam arti merangkum pengalaman seumur hidup sekelompok individu. Tetapi pengukuran periode juga penting, dalam hal tingkat kelahiran pada saat tertentu dalam menentukan pembukaan sejarah demografis yang terlihat dalam struktur usia populasi. Total tingkat kesuburan periode adalah ukuran kesuburan yang paling umum digunakan.

c. Kualitas Penduduk

Undang-undang nomor 52 tahun 2008 pasal 5 ayat 5, menyebutkan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan tentunya untuk mewujudkan manusia yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Untuk mewujudkannya, pembangunan kualitas penduduk di fokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

d. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan adalah persebaran penduduk yang merata sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya, yang dapat juga disebut dengan persebaran penduduk yang proporsional. Dengan demikian tidak ada lagi penumpukan penduduk di satu wilayah melebihi kemampuan daya dukungnya, sehingga dapat menyebabkan lingkungan yang tidak sehat, kumuh dan tidak nyaman. Dalam (Szabo, 2016) menjelaskan bahwa istilah yang dekat dengan mobilitas adalah urbanisasi. Selanjutnya masih dalam (Szabo, 2016) disebutkan secara tradisional, kota telah menjadi inti dari bisnis dan politik, dan dengan demikian sering mewakili pusat kekuasaan dan distribusi kesejahteraan negara bila berlaku. Kemudian dijelaskan pula dalam (Szabo, 2016) bahwa diversifikasi wilayah perkotaan mencakup ukuran dan kepadatan pusat kota serta kelas sosial dan kemampuan sosial penduduk kota. Konsep mobilitas pun dibahas oleh (Burch, 2017) yang menjelaskan

bahwa mobilitas penduduk teritorial, atau spasial terjadi pada berbagai skala. (Szabo, 2016), beberapa pendekatan untuk studi migrasi tidak berfokus pada individu, tetapi pada agregat populasi netto; jika, setelah memperhitungkan kelahiran dan kematian, populasi suatu daerah telah bertambah atau berkurang ukurannya dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya, kenaikan atau penurunan jumlah orang yang biasanya tinggal di daerah itu karena migrasi diasumsikan telah terjadi. Kemudian dalam (Caballero-Anthony *et al.*, 2013) dijelaskan bahwa mobilitas jauh lebih luas daripada migrasi. Ini menyangkut bergerak, dan studi mobilitas berusaha untuk menghubungkan "bentuk gerakan lintas skala dan dengan bidang penelitian yang sering diadakan terpisah. Lebih lanjut disampaikan bahwa kekuasaan, identitas, dan sehari-hari merupakan bidang penelitian utama dalam Geografi saat ini. disampaikan bahwa dampak teknologi komunikasi dan pergerakan baru menarik perhatian para peneliti yang bekerja di beberapa subbidang.

e. Kondisi Keluarga

Dalam seperti disampaikan (Kim, 2006) bahwa demografi, tidak ada banyak teori diskursif yang berhubungan dengan usia dan struktur seks. Sebaliknya, para ahli demografi terkenal karena teori formal dan telah mengembangkan beberapa teori formal yang paling matematis dalam ilmu sosial. Usia dan jenis kelamin, terutama usia, adalah pusat dari teori formal dalam demografi. Kondisi keluarga yang diinginkan melalui pembangunan keluarga sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial. Indikator utamanya adalah menurunnya

keluarga bermasalah, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga, dimana setiap keluarga mempunyai jumlah anak yang ideal sesuai dengan kemampuan keluarganya.

f. Data base Kependudukan

(Bloothoof *et al.*, 2015) menyebutkan setiap negara memiliki sumbernya sendiri yang mengandung mikrodata, juga dikenal sebagai data nominatif, yang berasal dari lembaga statistik nasional atau administrasi publik. Secara keseluruhan, sumber-sumber ini memiliki jenis informasi yang sama tentang warga negara, seperti nama, alamat, usia, pekerjaan dan status sipil, yang membuatnya jelas untuk menggunakan data ini dalam analisis komparatif. Cara sumber dibuat dan kemudian didigitalkan telah menghasilkan perlunya standarisasi metadata menggunakan kode numerik untuk mengatasi perbedaan besar dalam mengekspresikan entitas yang sama dan hambatan yang diciptakan oleh keanekaragaman bahasa. Proses standarisasi harus dilakukan secara lokal karena bahasa yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip di balik standarisasi dan standar yang digunakan dapat dan telah dibahas secara internasional dalam lokakarya dan konferensi. Kondisi yang diinginkan dalam pembangunan data base kependudukan sampai dengan akhir tahun perencanaan tentunya adalah tersusunnya sistem database kependudukan, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan dapat digunakan sebagai data dasar dalam perencanaan dan bahan pengambilan keputusan secara cepat atau menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan

(*Decision Support System*) (Kim, 2006). Dengan adanya pengelolaan database yang memadai maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, sehingga pada akhir tahun perencanaan seluruh kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat sudah dapat terpenuhi mulai dari Kartu Keluarga, eKTP dan dokumen pencatatan sipil.

2. Analisis SWOT

(Samset, 2010) Metode SWOT, kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) digunakan terutama untuk memperoleh informasi sebagai dasar untuk menciptakan strategi. Strategi ini muncul di antarmuka antara memetakan dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang dihadapi proyek atau organisasi dalam konteks operasinya, juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya.

Sasaran dari strategi ini adalah untuk memanfaatkan peluang yang tersedia berdasarkan kekuatan proyek, sementara pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal dan memperhitungkan kelemahan internal. Namun, tujuan dari metode ini terbatas. Pada prinsipnya ini digunakan secara prospektif sebagai bantuan untuk memetakan kondisi-kondisi penting yang relevan dengan perencanaan strategis di tahap akhir depan. Dalam banyak kasus, ini juga digunakan secara retrospektif sebagai bantuan untuk memetakan aspek-aspek positif dan negatif dari apa yang telah dicapai dalam kenyataan di mana sebuah proyek beroperasi. (Samset, 2010).

3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran referensi terkait kajian *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, publi-

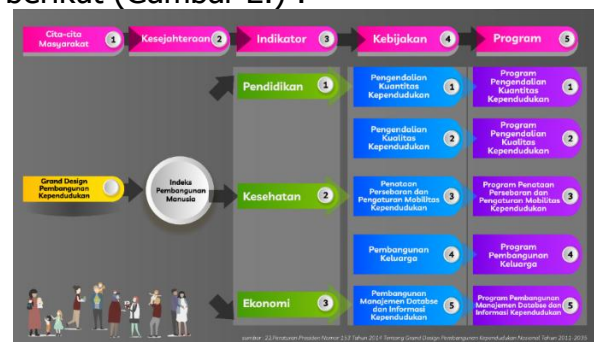
kasi ilmiah belum banyak ditemui namun hasil penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sudah banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, misalnya Kabupaten Karanganyar yang telah membakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang telah disahkan tanggal 6 Februari 2019. Selanjutnya di Kabupaten Wonogiri yang telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan hasil berupa *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2035. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan disusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

4. Kerangka Pikir

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 tahunan, yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program

pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah Kabupaten. Oleh karena itu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disusun dengan berpedoman kepada cita-cita masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya dengan indikator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang diserasikan dengan kebijakan kependudukan dengan acuan pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan, yang selanjutnya dijabarkan dalam program di masing-masing kebijakan. Secara skematis kerangka pikir perumusan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten tersaji dalam gambar berikut (Gambar 2.) :



Gambar 1. Kerangka Pikir Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan

5. Metode Penelitian

Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis secara kualitatif yang berasal dari hasil interaksi dengan pengelola data kependudukan yang kemudian dinarasikan dalam hasil analisis. Kuantitatif data kependudukan juga digunakan dalam mendeskripsikan data-data yang berdasarkan struktur dan lima aspek kependudukan (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan), serta kewilayahan di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya melakukan Penyusunan rekomendasi dan rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan Penyusunan model *Grand Design* Kependudukan. Kajian dideskripsikan dengan hasil dari identifikasi dan analisis kependudukan. Sumber data sekunder berasal dari :

- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen berupa data Kependudukan, Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen.
- b. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kebumen berupa Pendataan Keluarga (PK) Keluarga Berencana dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa data Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kebumen.

Data Primer yang terfokus dan relevan yang dapat digunakan, dengan mengadakan diskusi bersama Kepala Dinas dan para pejabat struktural di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Kebumen, hasil diskusi menjadi salah satu indikator kualitatif untuk analisa. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi fokus pada lima aspek kependudukan (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan). Skala penghitungan SWOT dirinci dengan menyesuaikan kuadran yang ada. Dalam setiap kuadran diberikan indikator dengan dengan kuantitas yang berbeda untuk mempertajam analisis. Empat kuadran tersebut kemudian dijadikan satu dalam kuadran baseline untuk melihat hasil kuadran secara keseluruhan. Hasil data yang diperoleh dianalisis menggunakan SWOT dengan instrumen pada masing-masing kuadran yang kemudian dideskripsikan. Analisis data ini dapat digunakan oleh penentu kebijakan terkait di masa yang akan datang. Alat yang digunakan dalam teknik analisis data secara kuantitatif berupa ARIMA. ARIMA sering juga disebut metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA sangat baik ketepatanannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya akan cenderung flat (mendatar/konstan) untuk periode yang cukup panjang. *Model Autoregresif Integrated Moving Average* (ARIMA) adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret waktu (*time series*) secara statistik

berhubungan satu sama lain (*dependent*), yang digunakan untuk memproyeksikan beberapa data yang dianalisis. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan selama 4 bulan (120 hari kalender) mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.

6. Hasil dan Pembahasan

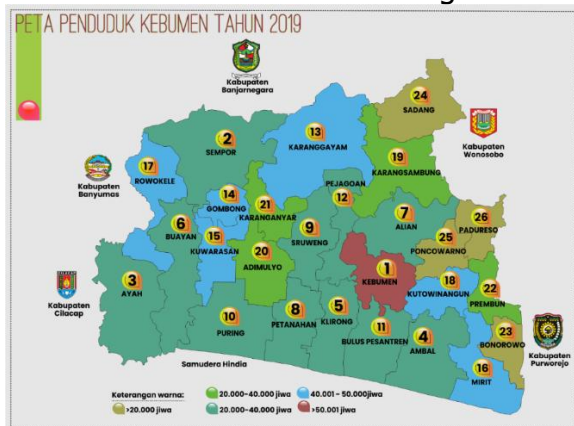
Ada dua dampak yang harus diperhatikan dan dimitigasi dengan baik. Pertama, meningkatnya angka kelahiran akan berbanding lurus dengan penyediaan layanan pendidikan, sehingga akan mendorong meningkatnya pengeluaran/ anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan. Pengendalian dampak ini sangat penting terutama pada daerah-daerah dengan kondisi anggaran dan layanan pendidikan yang kurang memadai, mereka dituntut untuk membuat perhitungan yang matang dalam penyediaan sarana- prasarana pendidikan dan skema jaminan pendidikan bagi kelompok umur sekolah. Kedua, usaha mengkonversi jumlah penduduk yang besar akibat tingkat kelahiran tinggi menjadi keunggulan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di era sekarang ini dimana membutuhkan peningkatan sekolah dengan spesifikasi teknik dan vokasional. Usaha mengkapitalisasi struktur umur penduduk menjadi modal pembangunan yang berkualitas ini akan berimplikasi pada meningkatnya daya saing ekonomi daerah. Namun demikian, kegagalan mengelolanya juga akan menimbulkan berbagai dampak yang sangat berat, meningkatnya beban fiskal daerah, meningkatnya tekanan sosial, tekanan ekonomi, serta keamanan yang berbanding lurus dengan tekanan penduduk.

a. Kuantitas Penduduk

Kabupaten Kebumen dengan cakupan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Samudera Hindia memiliki wilayah yang terdiri dari 26 Kecamatan. Pada wilayah kecamatan tersebut, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, dalam publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, total penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1.197.982 jiwa. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2018.

Pencantuman tanda angka dan warna peta di dalam setiap wilayah secara berurutan memberikan gambaran tentang banyaknya jumlah penduduk wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Angka terkecil merupakan wilayah kecamatan dengan penduduk berkuantitas banyak dan angka terbesar merupakan gambaran dari kuantitas penduduk terkecil di bandingkan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya pada warna merah memberikan tanda penduduk dalam satu wilayah kecamatan berjumlah lebih dari 60.000 jiwa, yaitu Kecamatan Kebumen. Kemudian pada warna hijau tua adalah wilayah kecamatan dengan sebaran jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 59.999 jiwa, yaitu Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Puring, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Alian, Kecamatan Buayan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Ayah serta Kecamatan Sempor. Selanjutnya warna biru muda adalah wilayah kecamatan dengan sebaran jumlah penduduk antara 40.000 jiwa sampai dengan 49.999 jiwa, terdiri dari Kecamatan

Karangsambung, Kecamatan Kuto-winangun, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Mirit, Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Gombang.



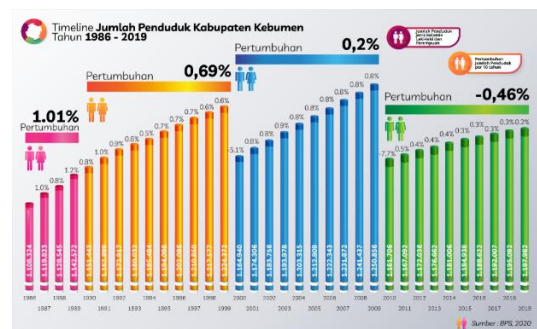
Gambar 2. Peta Penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2019 (BPS Kebumen, 2020)

Sedangkan warna hijau muda adalah wilayah kecamatan dengan cakupan jumlah penduduk sebanyak 20.000 jiwa sampai dengan 39.999 jiwa, meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Prembun, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Adimulyo. Terakhir pada peta wilayah Kabupaten Kebumen untuk kecamatan yang diberi warna coklat muda adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk dibawah 20.000 jiwa, yaitu Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Sadang.

Laju Pertumbuhan Penduduk secara umum dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Apabila dilihat dari timeline perkembangan jumlah penduduk sejak tahun 1986 sampai dengan 2019, merujuk pada publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen maka dalam gambar 8 dapat ditunjukan bahwa Kabupaten Kebumen secara umum kuantitas jumlah penduduknya selama kurun waktu 34 tahun dengan akumulasi jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin

perempuan, mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin berkurang apabila dibandingkan setiap sepuluh tahun. Pada gambar berikut memberikan gambaran terperinci tentang jumlah penduduk Kabupaten Kebumen kurun waktu 1986-2019.

Kuantitas penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 1986 hingga tahun 1989 mengalami pertumbuhan mencapai rata-rata 1,01% setiap tahunnya. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan tahun 1999, kuantitas penduduk juga mengalami pertumbuhan namun menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,69% setiap tahunnya. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan sama seperti sebelumnya namun memiliki rata-rata pertumbuhan yang menurun, setelah dilakukan penghitungan maka rata-rata mencapai 0,2% setiap tahunnya.



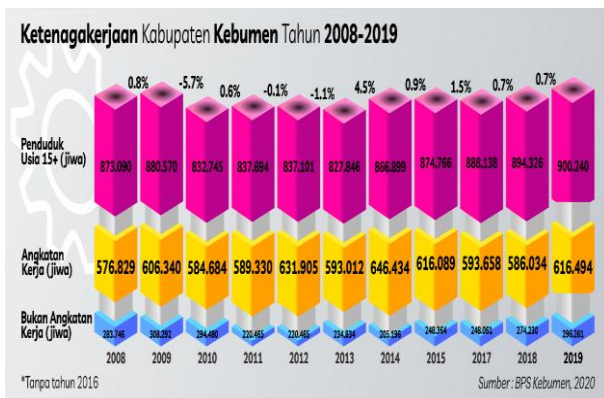
Gambar 3. Timeline Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 1986-tahun 2019.

Kemudian pada pertumbuhan penduduk antara tahun 2011 sampai dengan 2019 terjadi pertumbuhan penduduk yang semakin berkurang, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai -0,46% per tahun. Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Secara jangka panjang, keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk ini setidaknya dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masa mendatang.

Perkembangan

Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen seperti disajikan pada gambar di bawah dilihat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, jumlah angkatan kerja dan jumlah bukan angkatan kerja, memiliki kuantitas yang mengalami tambah dan kurang selama kurun tahun 2008-2019.



Gambar 4. Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2019

Kenaikan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang dibandingkan dengan tahun 2015 karena data tahun 2016 tidak terpublikasi sebesar 1,5%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 5,7%.

b. Kualitas Penduduk

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah

negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang



Gambar 5. IPM dan Komponen Kabupaten Kebumen tahun 2018.

dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

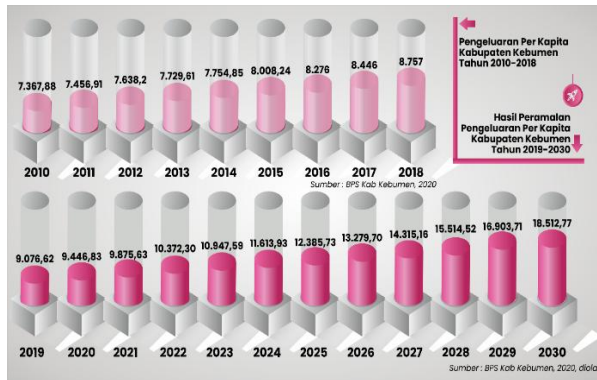
Dalam pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen IPM dijadikan acuan sebagai pengukur kualitas pembangunan manusia yang pada dasarnya sama dengan daerah lain di Indonesia.

Komponen yang diukur dalam IPM: 1. *Income* (pendapatan per kapita) 2. *Expectation of life* (angka harapan hidup) 3. *Years of scholly* (pendidikan) 4. *Elitaration rate* (tingkat buta huruf). IPM Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori *High human development* karena berada antara 48 sampai 94 poin.

c. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas

nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Dalam gambar berikut disajikan tentang Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2018 dan Hasil Peramalan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2030.



Gambar 6. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2018 dan Hasil Peramalan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2030.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan akhir tahun proyeksi memiliki trend yang selalu positif. Penghitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir, sebagai anggota populasi. Ini berbeda dengan pengukuran umum lainnya dari kemakmuran suatu daerah, seperti pendapatan rumah tangga, yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga, yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. Kondisi ini menjadi salah satu kekuatan dalam GDPK Kebumen di masa yang akan datang.

d. Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penduduk Kebumen pada tahun 2019 yang berjumlah 1.197.982 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 596.388 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 60.1594 jiwa, tersebar di wilayah kecamatan dengan penyebaran yang tidak merata. Persebaran penduduk sangat bergantung pada kondisi wilayah kecamatan, baik pada penggunaan lahan, jumlah fasilitas maupun kondisi ekonomi wilayah tersebut. Pada wilayah kecamatan yang penggunaan lahannya sebagian besar merupakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan fasilitas yang terbatas, jumlah penduduknya cenderung lebih sedikit dibandingkan di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

e. Pembangunan Keluarga

Sebagian besar dari keluarga di Indonesia masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, termasuk didalamnya pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

f. Pengembangan Data Base

Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen Akte Catatan Sipil.

Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan, diharapkan akan terwujud tertib administrasi kependudukan yang pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan. Undang-undang tersebut juga menjamin bahwa data kependudukan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan *database* kependudukan sudah dilaksanakan melalui implementasi regulasi tersebut, yang hakekatnya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko – blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi harus tersistem konkrit dan pragmatis artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengembangan database kependudukan diantaranya Kriteria Kebenaran, penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data dan hubungan antar data dan lain-lain, dapat menekan ketidakakuratan dalam pemasukan/penyimpanan data. Selain itu, pemilihan tipe data harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kriteria Konsistensi, merupakan aspek teknik, apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah schema diterima oleh pengguna atau tidak. Kondisi ini menghasilkan teratasinya duplikasi data karena masing-masing bagian mengelola data secara sendiri. Kriteria Relevansi Merupakan aspek teknik, apakah aspek aspek teknik pada basis data relevan digunakan. Dalam perancangan basis data semua tabel maupun kolom yang digunakan relevan dengan kebutuhan sistem. Kriteria Kelengkapan Kriteria kelengkapan adalah penilaian rancangan basis data terhadap kelengkapan data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rancangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Kriteria Minimalis Dikatakan minimalis, dengan menggunakan database pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Database memiliki kemampuan dalam mengelompokan, mengurutkan. Dengan rancangan yang benar, maka penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Pengembangan Database Kependudukan secara substantif

mengevaluasi kesempatan dan tantangan yang dihadapi proyek atau organisasi dalam konteks operasinya, juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya (Samset, 2010). Dalam kajian ini analisis SWOT digambarkan seperti di bawah ini yang mencakup lima aspek yang dikaji, pada setiap aspek dilakukan analisis SWOT secara terpisah dan pada akhir analisis dilakukan gabungan dari lima aspek.

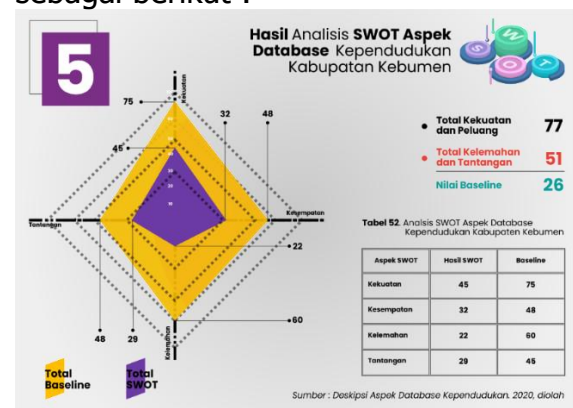


Gambar 8. Identifikasi Instrumen SWOT Aspek GDP Kependudukan Kabupaten Kebumen

Total instrumen yang digunakan sebanyak 302 instrumen yang terbagi dalam lima aspek yang dianalisis SWOT meliputi Aspek Kualitas Kependudukan, Aspek Kuantitas Kependudukan, Aspek Mobilitas dan Persebaran Kependudukan, Aspek Pembangunan Keluarga dan Aspek Database Kependudukan. Dalam instrumen tersebut dijabarkan untuk Kekuatan sebanyak 94 instrumen, kelemahan sebanyak 83 instrumen, kesempatan sebanyak 60 instrumen dan 65 instrumen untuk tantangan. Sumber instrumen berasal dari deskripsi lima aspek yang telah disajikan sebelumnya. Setiap instrumen diberikan kode identitas untuk kemudahan dan kepentingan deskripsi penyajian data yang dianalisis. Proses analisis dilakukan dengan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dibatasi dengan bobot nilai 1 untuk nilai tidak ada/tidak

setuju, 2 untuk nilai mungkin/ tidak tahu dan 3 untuk nilai ada/setuju yang dibantu dengan aplikasi sederhana menggunakan Excell. Setelah ditemukan hasil penghitungan kemudian disajikan dengan kurva radar untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mudah dipahami dan informatif.

Aspek Database Kependudukan setelah dilakukan analisis dengan empat kuadran memiliki hasil melalui SWOT melalui akumulasi dalam bentuk *baseline* dan hasilnya yang disajikan dengan model gambar kurva radar sebagai berikut :

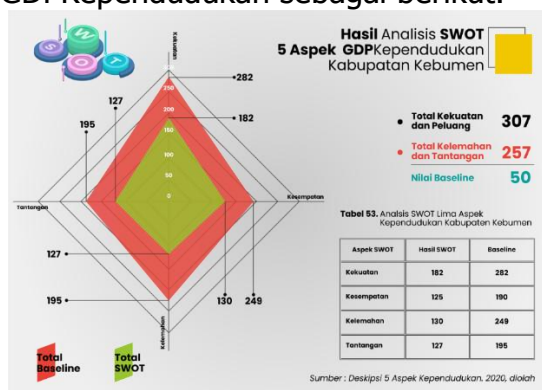


Gambar 9. Baseline dan hasil SWOT Aspek Database Kependudukan

Gambar di atas menunjukkan bahwa baseline dan hasil SWOT pada empat kuadran yang diukur. Hasil pengukuran menunjukkan Total Kekuatan dan Kesempatan menunjukkan bobot sebesar 77 poin lebih tinggi dari Total Kelemahan dan Tantangan sebesar 51 poin. Kondisi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya aspek kuantitas kependudukan di Kabupaten Kebumen sudah memiliki kesiapan yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan selisih lebih 26 poin antara kuadran positif dan kuadran negatif.

Selanjutnya dari kelima aspek yang telah dilakukan analisis SWOT maka dapat diketahui hasil pengukurannya dengan meng-

akumulasi baseline dan hasil SWOT. Secara keseluruhan dari kuadran kekuatan dan kesempatan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan kuadran kelemahan dan tantangan. Nilai baseline keseluruhan yang diperoleh sebesar 50 poin positif artinya kekuatan dan kesempatan yang ada dalam rangka penyusunan GDPK dapat memberikan kontribusi dengan memberikan perhatian terhadap kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Namun secara rinci pada kurva radar dapat dilihat hasil analisis SWOT terhadap lima aspek GDPKependudukan sebagai berikut.



Gambar 10. *Baseline* dan hasil SWOT Lima Aspek Kependudukan

Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh hasil bahwa Kabupaten Kebumen memiliki total kekuatan dan kesempatan yang dimiliki sebesar 307 poin lebih baik dari total kelemahan dan tantangan yang dihadapi sebesar 257 poin. Namun dalam menyusun GDPK Kabupaten Kebumen tetap memerlukan strategi agar hasil penyusunan GDPK memiliki indikator yang dapat terukur dan realistis dalam pencapaian indikator yang ditargetkan.

8. Kesimpulan

Hasil Identifikasi data kependudukan berdasarkan struktur dan lima aspek kependudukan (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk,

Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan) di Kabupaten Kebumen memberikan kesiapan dari beberapa faktor, meliputi

- Komitmen pemerintah yang diwujudkan dengan adanya beberapa regulasi tentang kependudukan meskipun masih secara parsial sudah mendorong adanya kepastian tentang penanganan masalah kependudukan,
- adanya kelembagaan yang menangani masalah kependudukan baik dalam konteks administrasi maupun substansi sehingga dapat menjadi modal dalam penyusunan GDPKependudukan di Kabupaten Kebumen, akan menjadi lebih baik hasilnya apabila terdapat integrasi antar kelembagaan dalam penanganan masalah kependudukan di Kabupaten Kebumen.
- Ketersediaan SDM yang terstruktur dan berjenjang mulai dari Kabupaten yang berada di Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa memberikan sumbangan terhadap penanganan masalah kependudukan meskipun dinamika SDM dan Kelembagaan, keterbatasan SDM menjadi masalah yang selalu muncul dalam penanganan masalah kependudukan dan pembangunan selama ini.
- Perkembangan Teknologi Informasi yang merupakan sarana utama dalam penanganan kependudukan dengan kemampuan validitas dan update berkelanjutan sehingga mampu menyediakan data yang dapat digunakan dalam rangka pentahapan proses pelaksanaan penanganan Kependudukan dalam penyusunan GDPKependudukan Kabupaten Kebumen.

- e. Partisipasi masyarakat, sebagai obyek dan subyek dalam kependudukan memiliki tingkat kepedulian yang baik dan responsif ditinjau dari ketersediaan data baik berupa data administrasi kependudukan maupun data substansi kependudukan.
- f. Meskipun secara implisit dibahas dalam penelitian ini formulasi anggaran menjadi salah satu masalah pokok yang muncul dalam penanganan masalah kependudukan. Anggaran yang cukup besar digunakan untuk output yang memiliki kesamaan dalam penanganan masalah kependudukan karena kewenangan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Hasil analisis data kependudukan telah dilakukan berdasarkan struktur dan lima aspek kependudukan yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Database Kependudukan di Kabupaten Kebumen. Meskipun dalam beberapa analisis memiliki keterbatasan dalam ketersediaan data, namun pada dasarnya proses analisis secara umum dapat dilakukan keterbatasan dengan subyektifitas penelitian. Dalam SWOT yang menganalisis 302 instrumen menunjukan kesiapan Kabupaten Kebumen dalam penyusunan GDPK dilihat dari hasil analisis baik secara parsial maupun analisis yang dilakukan secara keseluruhan terhadap lima aspek dalam penelitian ini. Analisis kemudian ditindaklanjuti dengan strategi yang telah dijadikan saran dalam kajian ini untuk Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan

Keluarga dan Pengembangan Database Kependudukan.

Penyusunan rekomendasi dan rencana pengintegrasian isu kependudukan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah diawali dengan kerangka GDPKependudukan, pendekatan literasi kemudian dilakukan identifikasi dan analisis merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kelima aspek kependudukan.

Integrasi isu kependudukan dapat dimulai dengan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen dimana hasil kajian ini menjadi salah satu referensi. Konteks *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini dapat digunakan sebagai salah satu bagian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen karena dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memuat beberapa indikator yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Implementasi integrasi dilakukan dengan penyusunan dashboard yang memberikan data dan informasi berkaitan dengan lima aspek dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebagai koordinator dan sebagai pendukung dalam memberikan data dan informasi secara terstruktur dan sesuai kewenangan kelembagaan dengan SDM yang terlatih dan perkembangan teknologi informasi yang ada. Untuk menjaga keberlangsungan terhadap capaian target dan progres indikator dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan monitoring, updating dan validasi secara berkala.

Model *Grand Design* Kependudukan didasarkan pada pendekatan administratif dan substantif dengan

integrasi lima aspek kependudukan yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah dengan memenuhi mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kebijakan kependudukan di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat terintegrasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) karena dengan arah, kebijakan dan pokok-pokok pembangunan kependudukan yang tertuang dalam dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dapat mendorong terwujudnya kondisi penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan.

9. Opsi Rekomendasi

- a. Penduduk merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi bersama dan integrasi dalam penanganan masalah kependudukan di Kabupaten Kebumen.
- b. Regulasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan dapat diartikan sebagai komitmen politik perlu disusun agar dalam penanganan masalah kependudukan memiliki kepastian hukum terintegrasi, terukur baik dalam konteks hasil penanganan masalah kependudukan, keberlanjutan penanganan data dan informasi masalah kependudukan dan program yang menjadi solusi penanganan masalah kependudukan.
- c. Penanganan masalah kependudukan yang dilakukan selama ini ketersediaan SDM dan kapasitas anggaran yang terbatas memerlukan solusi agar dapat sesuai target yang diharapkan, oleh karena itu memerlukan perencanaan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang tepat dan realistis.
- d. Dinamika global yang berkembang pesat mengakibatkan program

penanganan masalah kependudukan dan lainnya terjadi perubahan bahkan dapat berhenti. Oleh karena itu Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebaiknya memperhatikan fleksibilitas dan elastisitas perlu diperhatikan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditargetkan dengan ukuran indikator yang disepakati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, Tim Reviewer, Tim Panitia dan Tim Teknis dan seluruh yang telah memberikan fasilitasi dalam penelitian ini mulai dari tahap konsep ide sampai dengan selesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kebumen, 2020. Data Kebumen 2008-2019
<https://kebumenkab.bps.go.id/site/resultTab>. Diakses tanggal 22 Juli 2020
- BPS Kebumen, 2020. Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen tahun 1986-2019,
<https://kebumenkab.bps.go.id/site/resultTab>. Diakses tanggal 31 Juli 2020
- Data Kebumen 2018 (Metode Baru), (<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3305>). Diakses tanggal 20 Juni 2020.
- Bloothoof, G. *et al.* (2015) *Population reconstruction, Population Reconstruction*. doi: 10.1007/978-3-319-19884-2.
- Burch, T. K. (2017) *Fundamentals of Demographic Analysis: Concepts, Measures, and Methods, Canadian Studies in Population*. doi: 10.25336/p6tw25.

- Caballero-Anthony, M. *et al.* (2013) *Forced migration, Non-Traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Framework for Action*. doi: 10.4324/9781315623757-1.
- Freddy, Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Guli, G., Bal, O. M. and Cori, L. (2014) *Assessment of Population Health Risks of Policies, Assessment of Population Health Risks of Policies*. doi: 10.1007/978-1-4614-8597-1.
- Kim, D.-S. (2006) *Handbook of Population, Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. doi: 10.1177/009430610603500533.
- Samset, K. (2010) *Early Project Appraisal Making the Initial Choices*. Basingstoke, Hampshire RG21 6XS: Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited.
- Smallwood, S. (2017) *Dynamic Demographic Analysis, Population Studies*. doi: 10.1080/00324728.2016.1269973.
- Szabo, S. (2016) *Urbanisation and Intra-urban Inequalities in Nutritional Outcomes*. doi: 10.1007/978-3-319-26571-1_5.
- Akses Internet :
 AHH Kabupaten Kebumen, <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3305>, diakses 20 April 2020
 APK dan PAM Kabupaten Kebumen Tahun 2019, <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/-> diakses 2 September 2020, diolah.
- Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen tahun 2019 <https://kependudukan.kebumenkab.go.id/index.php/web>, diakses 20 Agustus 2020
- Laporan Pendataan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2019, <http://pk.bkkbn.go.id/PK/Laporan/Default.aspx>, diakses 26 Agustus 2020
- Peraturan-peraturan
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33 dan pasal 34);
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia;
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir
Miskin;
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2010
Tentang Narkotika;
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2010 Tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun
2014 Tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan
Nasional Tahun 2011-2035;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
Tentang Pembangunan yang
Berkeadilan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor:1 Tahun 2010
Seri:E Nomor:1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021.